

Peran Strategis Akademisi dalam Mendorong Inovasi Pelayanan Kesehatan Melalui Lomba Inovasi Daerah (LINDA) Kabupaten Cilacap Tahun 2025

The Strategic Role of Academics in Promoting Health Service Innovation through the 2025 Lomba Inovasi Daerah (LINDA) in Cilacap Regency

Lina Puspitasari^{1*}, Yenni Kristiana², Adi Kurniawan³

¹Universitas Amikom Purwokerto, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas Cilacap, Indonesia

³Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap, Indonesia

Korespondensi penulis: lina@amikompurwokerto.ac.id *

Article History:

Received: Juni 12, 2025;

Revised: Juli 18, 2025;

Accepted: Juli 28, 2025;

Online Available: Juli 30, 2025

Keywords: Innovation, Public Health, Regional Competition, Role of Academics, Strategic

Abstract: This article presents a critical analysis of the role of academics as judges in the 2025 Cilacap Regency Regional Innovation Competition (LINDA), focusing on the health sector. The study details the judging mechanism, which took place in two stages: an administrative selection to ensure completeness and suitability of documents, and a presentation assessment that explored the innovations' substance, sustainability, and potential for replication. Field observations revealed a wide variety of proposed innovations, ranging from the use of information technology for health services, village health cadre empowerment programs, to cross-sector partnership models. These innovations have been shown to have a significant impact on service efficiency, increased access, and strengthened community participation in maintaining health. However, various challenges remain, including limited competent human resources, minimal sustainable funding, and suboptimal supporting information systems. This analysis places these innovations within the framework of national innovation policy and compares them with good practices from case studies such as PUSTAKA and Mobile JKN, which serve as references for measuring the relevance, scalability, and sustainability of innovations at the regional level. The jury's role is positioned not merely as an assessor, but also as a mentor, facilitator, and validator of science-based innovative solutions. The involvement of academics in this process is a form of community service that has a direct impact on improving the quality of public policy, while strengthening the culture of innovation within local government. The findings of this study confirm that the active involvement of the jury can provide valuable empirical input for formulating strategies for developing regional health innovations.

Abstrak

Artikel ini menyajikan analisis kritis terhadap peran akademisi sebagai dewan juri dalam Lomba Inovasi Daerah (LINDA) Kabupaten Cilacap tahun 2025, dengan fokus pada sektor kesehatan. Kajian ini menguraikan secara rinci mekanisme penjurian yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu seleksi administrasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen, serta penilaian presentasi yang mengeksplorasi substansi, keberlanjutan, dan potensi replikasi inovasi. Observasi lapangan menunjukkan bahwa inovasi yang diajukan sangat beragam, mulai dari pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan kesehatan, program pemberdayaan kader kesehatan desa, hingga model kemitraan lintas sektor. Inovasi-inovasi tersebut terbukti memberikan dampak nyata terhadap efisiensi layanan, peningkatan akses, dan penguatan peran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Namun, berbagai tantangan masih ditemukan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya pendanaan berkelanjutan, serta belum optimalnya sistem informasi pendukung. Analisis ini menempatkan

inovasi-inovasi tersebut dalam kerangka kebijakan inovasi nasional dan membandingkannya dengan praktik baik dari studi kasus seperti PUSTAKA dan Mobile JKN, yang menjadi referensi dalam mengukur relevansi, skalabilitas, dan keberlanjutan inovasi di tingkat daerah. Peran dewan juri diposisikan bukan sekadar sebagai penilai, melainkan juga pembina, fasilitator, dan validator solusi inovatif berbasis keilmuan. Keterlibatan akademisi dalam proses ini merupakan wujud pengabdian masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas kebijakan publik, sekaligus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif dewan juri mampu memberikan masukan empirik yang berharga untuk perumusan strategi pengembangan inovasi kesehatan daerah.

Kata Kunci: Inovasi, Kesehatan Publik, Lomba Daerah, Peran Akademisi, Strategis

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, distribusi layanan yang belum merata, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, berkualitas, dan transparan, menuntut adanya pendekatan baru dalam bentuk inovasi pelayanan publik (Dwiyanto, 2021; Nugroho et al., 2020). Inovasi dalam konteks ini bukan hanya sebatas pengembangan teknologi atau prosedur baru, melainkan juga mencakup perbaikan sistem tata kelola, perluasan akses, dan peningkatan kapasitas institusi layanan publik, khususnya di bidang kesehatan (Megawati, 2024; Mozin et al., 2025).

Pentingnya inovasi dalam pelayanan kesehatan juga diperkuat oleh hasil studi yang menunjukkan bahwa inovasi mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas layanan, terutama ketika dikembangkan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat (Mulianingsih, 2021; Situmorang, 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendorong pertumbuhan dan replikasi inovasi, termasuk melalui mekanisme kompetisi.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah (LINDA) sebagai strategi menjaring dan memperkuat inovasi pelayanan publik dari tingkat OPD, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, hingga desa dan BUMD. Kompetisi ini, yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2021, bertujuan tidak hanya untuk mengapresiasi inisiatif lokal, tetapi juga untuk mempercepat adopsi praktik-praktik baik dalam tata kelola pelayanan publik (B. K. Cilacap, 2025).

Dengan demikian, LINDA menjadi salah satu bentuk konkret implementasi kebijakan inovasi publik di tingkat daerah, sekaligus menjadi wadah penguatan kapasitas kelembagaan dan pengarusutamaan nilai-nilai good governance dalam layanan publik. Inisiatif ini juga selaras dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi mandat kepada daerah untuk melakukan inovasi

guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 yang mengatur penilaian dan penghargaan atas inovasi melalui skema Innovative Government Award (IGA).

Sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama karena merupakan urusan wajib yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Inovasi seperti PUSTAKA (Puskesmas Tanpa Antrian) di Kota Semarang dan aplikasi Mobile JKN dari BPJS Kesehatan menunjukkan bagaimana pendekatan teknologi dan manajemen inovatif dapat mengatasi hambatan klasik seperti antrean panjang, keterbatasan petugas, serta kesenjangan informasi (Prakoso et al., 2022; Rokhman, 2020).

Dalam konteks inilah, keterlibatan akademisi sebagai dewan juri dalam LINDA menjadi signifikan. Selain menilai, akademisi juga berperan sebagai mentor dan katalisator pengembangan ide inovatif. Peran ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan sebagaimana ditekankan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keterlibatan akademisi mengisi kesenjangan antara teori dan praktik serta mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Suyanto & Salamah, 2020)(Suyatno & Hartati, 2023).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk merefleksikan pengalaman sebagai dewan juri kategori Puskesmas/RSUD pada ajang LINDA 2025 dan memberikan rekomendasi strategis berdasarkan temuan lapangan untuk memperkuat inovasi daerah, khususnya di sektor kesehatan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif sebagai dewan juri pada ajang Lomba Inovasi Daerah (LINDA) Kabupaten Cilacap Tahun 2025. Penilaian dilakukan terhadap inovasi-inovasi yang diajukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah daerah. Peran ini merupakan aplikasi langsung dari konsep pengabdian masyarakat berbasis keilmuan, di mana keahlian akademis dimanfaatkan untuk mengevaluasi, membimbing, dan memvalidasi inovasi praktis. Hal ini sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pilar pengabdian, yang menekankan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan masyarakat dan memfasilitasi transformasi sosial.

Pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selama periode Mei 2025. Subjek kegiatan meliputi proposal inovasi dari 14 Puskesmas dan RSUD yang berpartisipasi dalam kompetisi LINDA 2025. Tim juri terdiri dari tsINTA orang: Lina

Puspitasari (Universitas Amikom Purwokerto), Yenni Kurniasih (STIKES Serulingmas), dan Adi Kurniawan (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap). Keterlibatan akademisi dan birokrat daerah mencerminkan sinergi multipihak yang penting dalam validasi dan pengembangan inovasi sektor kesehatan daerah (Setiawan et al., 2022). Komposisi dewan juri yang melibatkan akademisi dari berbagai universitas dan perwakilan dari Dinas Kesehatan menunjukkan komitmen terhadap kolaborasi multi-pihak dalam mendorong inovasi daerah. Pendekatan kolaboratif ini, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan profesional, sangat penting untuk implementasi kebijakan yang efektif dan pengembangan ekosistem inovasi yang komprehensif. Sinergi antara pengetahuan teoretis, pengalaman praktis di sektor kesehatan, dan pemahaman kebijakan pemerintah daerah memastikan objektivitas dan kualitas penilaian, serta memberikan umpan balik yang holistik bagi inovator.

Proses seleksi inovasi dalam LINDA Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dilaksanakan dalam dua tahap yang sistematis:

1. Tahap I: Seleksi Administrasi

Dari total 14 proposal inovasi yang diajukan, 10 besar dipilih berdasarkan kelengkapan dokumen, sistematika penulisan, dan kejelasan inovasi yang diusulkan. Tahap ini berfungsi sebagai penyaringan awal untuk memastikan bahwa semua inovasi memenuhi persyaratan dasar dan memiliki kelengkapan informasi yang memadai untuk penilaian lebih lanjut.

2. Tahap II: Penilaian Presentasi

Sepuluh besar peserta yang lolos seleksi administrasi kemudian melanjutkan ke tahap penilaian presentasi. Pada tahap ini, mereka memaparkan inovasi mereka secara langsung di hadapan dewan juri. Penilaian pada tahap ini menambahkan bobot pada aspek presentasi, yang meliputi kejelasan pemaparan, dampak inovasi yang diusulkan, dan potensi replikasi inovasi tersebut. Dari tahap ini, enam inovasi terbaik dipilih sebagai finalis.

Proses penjurian dua tahap ini konsisten dengan metodologi yang umum diterapkan dalam kompetisi inovasi daerah di Indonesia. Sebagai contoh, Lomba Inovasi Daerah (*Inoda Award*) Kabupaten Magetan Tahun 2025 juga menerapkan penilaian dua tahap, yaitu penilaian proposal dan video secara daring, diikuti dengan presentasi langsung dan kunjungan lapangan untuk finalis. Kriteria seperti "dampak inovasi" dan "potensi replikasi" yang digunakan dalam LINDA Cilacap secara langsung selaras dengan poin-poin evaluasi utama dalam pedoman inovasi nasional dan kerangka penilaian inovasi umum. Pendekatan ini memastikan bahwa inovasi dinilai tidak hanya berdasarkan kepatuhan formal tetapi juga berdasarkan substansi, potensi dampak, dan kelayakan untuk direplikasi. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan

dan standarisasi dalam pelaksanaan inisiatif semacam ini.

3. HASIL

Sebanyak 14 inovasi dari Puskesmas dan Rumah Sakit mengikuti seleksi awal dalam LINDA Kabupaten Cilacap Tahun 2025. Daftar inovasi tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Inovasi yang Diseleksi LINDA Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Judul Inovasi	Instansi
1	Ruang Edukasi Pasien Gagal Ginjal Kronis (RENALIS)	BLUD RSUD Cilacap
2	TERLIHAT PESONA	BLUD RSUD Majenang
3	PT Sy BABE	BLUD RSUD Majenang
4	SI NONA KEPO	BLUD RSUD Majenang
5	SIPITALOKA	Puskesmas Majenang I
6	ANTAR CAREDOK PEUDES	Puskesmas Majenang I
7	PERI GIGIKU	Puskesmas Kroya I
8	PERISAI CINTA	Puskesmas Dayeuhluhur I
9	SEBLAK KELIMPANG	Puskesmas Dayeuhluhur I
10	Mobile Pelayanan Kesehatan Keliling	Puskesmas Kroya I
11	SANKER RAYA	Puskesmas Majenang II
12	GEMPITA	Puskesmas Cilacap Utara I
13	CEK SERVER MBA IKE	Puskesmas Cilacap Utara I
14	Kelapa Muda Jeruk Manis	Puskesmas Jeruklegi I

Sumber: Data Sekunder (Bapeda Cilacap, 2025)

Inovasi yang muncul dalam LINDA Kabupaten Cilacap 2025 menunjukkan keragaman yang luar biasa. Spektrum inovasi meliputi solusi teknologi sederhana berbasis barang bekas, seperti "PT Sy BABE", sistem digital untuk pelayanan, seperti "SI NONA KEPO", hingga program edukasi kesehatan masyarakat yang komprehensif, seperti "SANKER RAYA" dan "GEMPITA". Keragaman ini memperlihatkan pemahaman mendalam para inovator terhadap kebutuhan lokal dan kemampuan mereka untuk mengembangkan solusi yang relevan. Banyak inovasi menunjukkan dampak langsung terhadap peningkatan efisiensi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun semangat berinovasi yang tinggi terlihat jelas, proses penjurian juga mengungkap tantangan umum yang dihadapi inovator dalam fase implementasi. Tantangan ini terutama berkaitan dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), alokasi anggaran, dan ketersediaan sistem informasi yang memadai. Hambatan-hambatan ini tidak hanya terjadi di Cilacap, tetapi merupakan isu sistemik yang sering ditemui dalam inovasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Berbagai studi mengidentifikasi kendala serupa, termasuk birokrasi yang rumit, kurangnya infrastruktur digital, keterbatasan kompetensi SDM, minimnya anggaran inovasi, serta resistensi terhadap perubahan dan kendala regulasi. Dalam proses penjurian, dewan juri secara implisit maupun eksplisit menerapkan kerangka evaluasi yang terstruktur.

Merujuk pada prinsip-prinsip evaluasi inovasi, pertanyaan-pertanyaan kunci yang memandu penilaian dewan juri meliputi:

1. Apakah Kebutuhan yang Dituju Benar-Benar Nyata? Penilaian ini berfokus pada urgensi dan skala masalah yang ingin dipecahkan, serta bukti yang disampaikan oleh inovator, seperti data antrean pasien atau keluhan masyarakat.
2. Apakah Solusi yang Diajukan Memang Bisa Menjawab Kebutuhan Itu? Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas solusi dalam mengatasi masalah yang teridentifikasi, keunggulan dibandingkan pendekatan yang sudah ada, dan kelayakan implementasi di dunia nyata, seringkali didukung oleh prototipe atau hasil uji coba awal.
3. Apakah Inovasi Ini Menciptakan Nilai yang Jelas? Penilaian ini mempertimbangkan manfaat nyata yang dihasilkan, seperti peningkatan efisiensi, penghematan biaya, peningkatan kepuasan pasien, atau dampak sosial yang lebih luas, serta potensi keberlanjutan atau replikasi.

Kriteria-kriteria ini selaras dengan aspek "dampak inovasi" dan "potensi replikasi" yang menjadi fokus dalam penjurian LINDA, serta kriteria "Daya Ungkit Kemanfaatan Inovasi" dan "Keberlanjutan dan Prospek Pengembangan" dalam penghargaan inovasi daerah lainnya.

Tantangan yang teridentifikasi dalam LINDA Cilacap, yaitu terkait SDM, anggaran, dan sistem informasi, bukan merupakan isu yang terisolasi. Ini mencerminkan hambatan sistemik yang umum terjadi dalam inovasi pelayanan publik di Indonesia. Artinya, meskipun semangat berinovasi di tingkat lokal tinggi, implementasi dan skalabilitas ide-ide inovatif seringkali terhambat oleh keterbatasan struktural dan sumber daya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemauan untuk berinovasi dan kemampuan untuk mengimplementasikan serta mempertahankan inovasi tersebut.

Prevalensi tantangan implementasi ini secara langsung memengaruhi kriteria "keberlanjutan dan prospek pengembangan" serta "replikasi" inovasi, yang merupakan elemen kunci dalam penilaian LINDA. Inovasi, meskipun brilian secara konsep, mungkin sulit mencapai potensi penuhnya atau direplikasi jika masalah fundamental ini tidak diatasi. Hal ini menyiratkan bahwa kompetisi LINDA di masa depan, dan kebijakan inovasi daerah secara umum, harus bergeser dari sekadar mengidentifikasi ide-ide inovatif menjadi secara aktif mendukung implementasi berkelanjutan dan peningkatan skala inovasi dengan mengatasi hambatan sistemik ini secara proaktif.



Gambar 1 Kegiatan paparan LINDA

Gambar 1 menunjukkan proses seleksi tahap paparan inovasi. Paparan dilakukan oleh 10 peserta lolos tahap awal. Tahap ini para juri akan memilih 6 judul inovasi terbaik untuk dijadikan pemenang lomba.

4. DISKUSI

Peran dewan juri dalam LINDA Kabupaten Cilacap melampaui sekadar penilaian. Keterlibatan ini mencakup pemberian masukan strategis untuk pengembangan inovasi, penyediaan umpan balik objektif terkait aspek teknis dan keberlanjutan, serta menghubungkan pelaku inovasi dengan potensi pendampingan atau penguatan dari instansi lain. Pendekatan ini mengubah kompetisi menjadi platform pembinaan dan peningkatan kapasitas (P. K. Cilacap, 2025).

Keterlibatan aktif ini sejalan dengan prinsip inti pengabdian kepada masyarakat oleh akademisi, yang melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan komunitas dan memfasilitasi transformasi sosial. Akademisi, sebagai "agen perubahan", memberikan keahlian dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan memperkuat kapasitas lokal. Kehadiran juri yang kompeten dan berpengalaman memastikan penilaian yang objektif dan berkualitas, serta memberikan umpan balik konstruktif yang meningkatkan standar kompetisi dan mendorong pengembangan diri peserta. Mekanisme umpan balik ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan inovasi (B. R. dan I. D. K. Buleleng, 2025).

Sifat interaktif dari proses penjurian, terutama selama sesi presentasi dan umpan balik, memfasilitasi transfer pengetahuan langsung dari dewan juri kepada para inovator. Ini membantu peserta menyempurnakan ide-ide mereka, meningkatkan strategi implementasi, dan memperoleh wawasan tentang konteks kebijakan yang lebih luas. Ini merupakan kontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Peran dewan juri ini juga mencerminkan pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana pilar ketiga, pengabdian kepada masyarakat, secara aktif diwujudkan melalui penerapan pengetahuan akademis untuk mengatasi tantangan dunia nyata. Selain itu, peran ini berfungsi sebagai "kontrol sosial" dengan memastikan bahwa inovasi dievaluasi berdasarkan kriteria objektif dan berkontribusi secara tulus terhadap kesejahteraan publik (D. K. dan I. K. Buleleng, 2025; Yuliana & Kusuma, 2021).

Umpan balik yang aktif dan konstruktif serta masukan strategis yang diberikan oleh dewan juri secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi, bahkan bagi inovasi yang tidak menjadi pemenang. Ini mengubah kompetisi dari sekadar proses seleksi menjadi platform pembangunan kapasitas, menumbuhkan budaya inovasi yang lebih kuat di dalam institusi kesehatan yang berpartisipasi. Hal ini merupakan aplikasi praktis dari konsep pengabdian masyarakat berbasis keahlian.

Dengan terlibat aktif dalam proses penjurian dan memberikan umpan balik konstruktif, akademisi tidak hanya mengevaluasi, tetapi juga secara implisit membentuk lintasan inovasi dan arah kebijakan di tingkat lokal untuk masa depan. Pengaruh kebijakan informal ini, yang didorong oleh temuan berbasis bukti dari kompetisi, dapat mengarah pada program dukungan yang lebih terarah atau penyesuaian regulasi oleh pemerintah daerah, sehingga meningkatkan efektivitas keseluruhan inisiatif inovasi daerah.

5. KESIMPULAN

Peran sebagai dewan juri dalam ajang Lomba Inovasi Daerah (LINDA) Kabupaten Cilacap Tahun 2025 merupakan bentuk nyata pengabdian masyarakat berbasis keilmuan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Penilaian inovasi di sektor kesehatan membuka wawasan baru mengenai beragam solusi yang dikembangkan di tingkat lokal dan memperkuat budaya inovatif di lingkungan Puskesmas dan Rumah Sakit. Keterlibatan ini secara signifikan berkontribusi pada penguatan budaya inovasi dalam institusi pelayanan kesehatan daerah dan selaras dengan upaya nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Amikom Purwokerto, STIKES Serulingmas, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap atas dukungan, kerja sama, dan kesempatan yang diberikan selama proses pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Buleleng, B. R., & I. D. K. (2025, Juli 9). *Lomba inovasi OPD 2025, bukan sekedar siapa pemenang!* BRIDA Kabupaten Buleleng. https://brida.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/30_lomba-inovasi-opd-2025-bukan-sekedar-siapa-pemenang_2025-07-09-09-25-19
- Buleleng, D. K., & I. K. (2025). *Presentasi inovasi di hadapan dewan juri* [Postingan Instagram]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DJStGo-Sbq0/>
- Cilacap, B. K. (2025). *Panduan Lomba Inovasi Daerah (LINDA) Kabupaten Cilacap 2025*. Bappeda Kabupaten Cilacap.
- Cilacap, P. K. (2025). *CISA raih juara 3 Lomba Inovasi Daerah (LINDA)*. BKPSDM Kabupaten Cilacap. <https://bkd.cilacapkab.go.id/p/1404/cisa-raih-juara-3-lomba-inovasi-daerah>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM Press.
- Megawati, M. (2024). Tipologi inovasi dalam layanan publik: Implementasi dan tantangan mall pelayanan publik. *Jurnal Pamarenda*, 4(1).
- Mozin, S. Y., Ma'ruf, R., & Kadir, F. (2025). Typology and stages of innovation in public service: Focus and locus approach in key success factor analysis. *Journal of Publicness Studies*, 2(2).
- Mulianingsih, S. (2021). Inovasi pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 dalam meningkatkan tata pemerintahan di Kota Cimahi. *Jurnal Media Demokrasi*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i1.2470>
- Nugroho, A. A., Sutrisno, E., & Yusuf, R. R. (2020). Optimalisasi layanan kesehatan melalui inovasi pelayanan publik: Proyek perubahan kepemimpinan. *Jasispol*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdi.v1i1.4>
- Prakoso, M., Lestari, A., & Wijayanti, T. (2022). Challenges in implementing health innovation in Indonesian Puskesmas. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 25(3), 189–198.
- Rokhman, A. (2020). Digital innovation in public health services: Lessons from Indonesia. *Public Health Forum*, 11(1), 33–41.
- Setiawan, B., Hidayat, A., & Maulana, R. (2022). Peran akademisi dalam ekosistem inovasi daerah. *Jurnal Ilmu Kebijakan Publik*, 9(2), 112–124.
- Situmorang, A. G. (2021). *Inovasi pelayanan kesehatan melalui sistem basis data* [Skripsi, Universitas Lampung].

- Suyanto, & Salamah, U. (2020). *Riset kebidanan: Metodologi dan aplikasi*. Mitra Cendikia Press.
- Suyatno, T., & Hartati, S. (2023). Strengthening local governance through innovation awards. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Daerah*, 4(1), 55–67.
- Yuliana, R., & Kusuma, B. (2021). Evaluasi implementasi inovasi kesehatan daerah di tengah tantangan SDM dan infrastruktur. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(1), 47–58.